

**ANALISIS YURIDIS PASAL 55 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP MODEL PENYELESAIAN SENGKETA  
PERBANKAN SYARIAH**

**TESIS**

Diajukan Kepada Progan Pascasajana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

**Oleh**

**MUHAMAD WARDANY ANWAR**  
**NPM : 1423020030**

**PEMBIMBING I : Dr. Hi. Khairuddin Tahmid, M.H.**  
**PEMBIMBING II : Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**KONSENTRASI HUKUM BISNIS DAN KEUANGAN SYARI'AH**



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1439 H/2018 M**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Wardany Anwar

NPM : 1423020030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Kosentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Implikasinya Terhadap Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” adalah benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 15 September 2018  
Yang Menyatakan,

Muhamad Wardany Anwar  
NPM. 1423020030

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan prinsip dasar dari penyelesaian sengketa didalam perbankan syariah. Namun didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tersebut menghadirkan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa syariah yang justru bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) yang mengamankan pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Dua forum yang termasuk kedalam lembaga litigasi inilah yang menyebabkan pertentangan dua lembaga peradilan yang sudah seharusnya tidak ada yang saling melangkahi karena kewenangan masing-masing peradilan telah ditentukan oleh undang-undang. Penulis tertarik untuk meneliti tentang isi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan implikasinya terhadap model penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Rumusan masalahnya adalah seputar bagaimanakah politik hukum pembentukan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga menimbulkan pro-kontra kewenangan di lingkungan lembaga peradilan dan bagaimana model penyelesaian sengketa perbankan syariah yang memiliki kekuatan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam politik hukum pembentukan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga menimbulkan pro-kontra kewenangan di lingkungan lembaga peradilan, serta untuk mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa yang lebih memiliki kekuatan hukum.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif, jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dipergunakan adalah Al-Qur'an, Hadits, kitab Undang-Undang hukum perdata. Sedangkan sumber data sekunder adalah berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

Sesuai dengan analisis hasil penelitian bahwa model penyelesaian sengketa perbankan syariah, kewenangan yang diberikan kepada peradilan agama untuk mengadili agar tidak terjadi dualisme kewenangan hukum karena dilandaskan pada beberapa alasan yaitu bahwa apabila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu dikeluarkanlah putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012 bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap pada peradilan agama sebagai lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selama ini penyelesaian sengketa terkait dengan sengketa perbankan syariah, pada umumnya dilakukan melalui jalur Peradilan Umum dan Basyarnas. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka masyarakat saat ini memiliki kepastian dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dimaksud, yaitu Peradilan Agama.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara :

**Nama Mahasiswa : MUHAMAD WARDANY ANWAR**

**NPM : 1423020030**

**Program Srtudi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Kosentrasi : Hukum Bisnis dan Keuangan**

**Judul Tesis : “ANALISIS YURIDIS PASAL 55 AYAT (1) DAN (2)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008  
TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP MODEL  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH”.**

**Menyetujui**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam ujian terbuka pada  
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

**Bandar Lampung, 29 Agustus 2018**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Hi. Khairuddin Tahmid, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

**Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum  
NIP. 197005022000032001**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.  
NIP. 196505271992032002**

## **PENGESAHAN**

**Tesis dengan judul : “ANALISIS YURIDIS PASAL 55 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”, disusun oleh Muhamad Wardany Anwar, NPM 1423020030, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan.**

### **Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)**  
**Sekretaris : Rohmat, S.Ag., M.HI. (.....)**  
**Penguji I : Dr. Asriani, M.H (.....)**  
**Penguji II : Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. (.....)**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag.  
NIP. 196010201988031005**

**Tanggal Lulus Ujian Terbuka : 30 Agustus 2018**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543 b/u/1987<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

| No | Huruf Arab | Huruf Latin        | No | Huruf Arab | Huruf Latin |
|----|------------|--------------------|----|------------|-------------|
| 1  |            | Tidak dilambangkan | 16 |            |             |
| 2  |            | B                  | 17 |            |             |
| 3  |            | T                  | 18 |            | ‘           |
| 4  |            |                    | 19 |            | G           |
| 5  |            | J                  | 20 |            | F           |
| 6  |            |                    | 21 |            | Q           |
| 7  |            | Kh                 | 22 |            | K           |
| 8  |            | D                  | 23 |            | L           |
| 9  |            |                    | 24 |            | M           |
| 10 |            | R                  | 25 |            | N           |
| 11 |            | Z                  | 26 |            | W           |
| 12 |            | S                  | 27 |            | H           |
| 13 |            | Sy                 | 28 |            | ‘           |
| 14 |            |                    | 29 |            | Y           |
| 15 |            |                    |    |            |             |

### 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harakat dan Huruf | Huruf dan Tanda |
|-------------------|-----------------|
|                   |                 |
|                   |                 |
|                   |                 |

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (CV Pustaka Agung Harapan, 2006).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Penulisan tesis ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syari'ah dalam ilmu Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Sehubungan dengan tersusunnya Tesis ini kami mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penulisan ini. Secara khusus kami menyampaikan terimakasih kepada bapak Dr.Hi.Khairuddin Tahmid, M.H.selaku pembimbing I dan bapak Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah membimbing kami hingga selesainya thesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kritik dan saran para pembaca akan kami terima dengan senang hati demi penyempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.Kami berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin....

Bandar Lampung, 16 April 2018  
Penulis

Muhamad Wardany Anwar  
NPM 1423020030

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| PERNYATAAN ORISINALITAS .....  | ii   |
| ABSTRAK .....  | iii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | iv   |
| PENGESAHAN .....   | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | vii  |
| DAFTAR ISI.....  | viii |
| BAB I PENDAHULUAN  |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....   | 15   |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 15   |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 15   |
| BAB II LANDASAN TEORI  |      |
| A. Perbankan Syariah.....  | 17   |
| 1. Pengertian Perbankan Syariah.....   | 17   |
| 2. Dasar Hukum Perbankan Syariah .....   | 20   |
| 3. Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) Perbankan Syariah .....                                | 23   |
| 4. Sifat-Sifat Perbankan Syariah .....   | 26   |
| 5. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah.....  | 28   |
| B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....                                 | 37   |
| 1. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....  | 37   |
| 2. Dasar Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah ..... | 38   |
| 3. Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....                      | 41   |
| 4. Jenis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah .....                                   | 51   |



### BAB III METODE PENELITIAN

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian.....   | 84  |
| B. Sumber Data.....                  | 84  |
| C. Metode Pengumpulan Data .....     | 85  |
| D. Metode Pengolahan Data .....      | 86  |
| E. Analisis Data .....               | 86  |
| F. Telaah Pustaka.....               | 87  |
| G. Kerangka Pemikiran .....          | 90  |
| H. Sistematika Penulisan Tesis ..... | 100 |

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

|  |     |
|--|-----|
| A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008<br>Pasal 55 Ayat (1) dan (2)..... | 103 |
| B. Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah yang Lebih Memiliki<br>Kekuatan Hukum.....      | 112 |

### BAB V PENUTUP

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 124 |
| B. Saran.....      | 126 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 128 |
|----------------------|-----|

### LAMPIRAN-LAMPIRAN